

# **KLIPING BERITA MEDIA MASSA**

**Kamis, 12 Desember 2019**



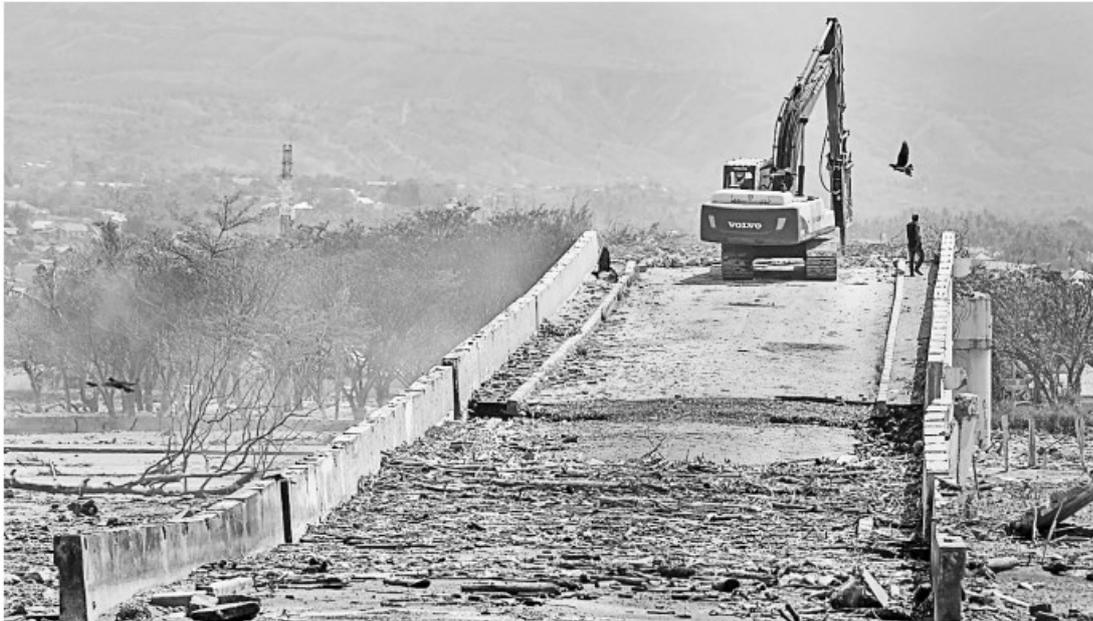
**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Kamis, 12 Desember 2019	Berita Foto	Jembatan yang pernah menjadi ikon Kota Palu rusak dilanda gempa dan tsunami tahun lalu dan akan direkonstruksi dengan memanfaatkan dana hibah dari Jepang.
2	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Kamis, 12 Desember 2019	Sosialisasi Jaminan Sosial Agar Masuk Vokasi	Kementerian PUPR mengusulkan agar informasi manfaat jaminan sosial bisa masuk ke dalam program vokasi dan pelatihan bagi para pekerja konstruksi, termasuk di dalamnya sosialisasi upaya preventif terjadinya kecelakaan kerja.
3	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Kamis, 12 Desember 2019	IBU KOTA NEGARA BARU: Proses Inventarisasi Lahan Tuntas	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah merampungkan proses inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) pada lahan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur.
4	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Kamis, 12 Desember 2019	PEMBIAYAAN PERUMAHAN: BP Tapera Direalisasikan 2021	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Eko D. Heripurwanto mengatakan bahwa Tapera baru akan direalisasikan untuk membiayai rumah subsidi pada 2021.
5	Media Indonesia (Halaman, 5)	Kamis, 12 Desember 2019	Tol Cisumdawu Terhambat Pembebasan Lahan	Belum selesainya Tol Cisumdawu membuat jumlah wisatawan ke Bandung menurun, karena penerbangan terlanjur dialihkan ke Bandara Kertajati.
6	Media Indonesia (Halaman, 13)	Kamis, 12 Desember 2019	Capaian dan Target Kementerian PUPR: Infrastruktur Untuk Kesejahteraan Rakyat	Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kinerja serta kerja keras seluruh jajaran Kementerian PUPR.
7	Koran Tempo (Halaman, Metro 1)	Kamis, 12 Desember 2019	Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Siap Dioperasikan	Presiden Joko Widodo hari ini dijadwalkan meresmikan jalan tol layang Jakarta-Cikampek. Jalan bebas hambatan ini rencananya mulai difungsikan untuk menyambut libur Natal dan tahun baru.

Judul	<b>Berita Foto</b>	Tanggal	Kamis, 12 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Jembatan yang pernah menjadi ikon Kota Palu rusak dilanda gempa dan tsunami tahun lalu dan akan direkonstruksi dengan memanfaatkan dana hibah dari Jepang.		

► REKONSTRUKSI JEMBATAN PALU IV



*Antara/Basri Marzuki*

**Pekerja menggunakan** alat berat merobohkan rangka Jembatan Palu IV di Pantai Kampung Lere, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (11/12). Jembatan yang pernah menjadi ikon Kota Palu tersebut rusak dilan-

da gempa dan tsunami tahun lalu dan akan direkonstruksi dengan memanfaatkan dana hibah dari Jepang.

Judul	<b>Sosialisasi Jaminan Sosial Agar Masuk Vokasi</b>	Tanggal	Kamis, 12 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Kementerian PUPR mengusulkan agar informasi manfaat jaminan sosial bisa masuk ke dalam program vokasi dan pelatihan bagi para pekerja konstruksi, termasuk di dalamnya sosialisasi upaya preventif terjadinya kecelakaan kerja.		

► **TENAGA KERJA KONSTRUKSI**

## Sosialisasi Jaminan Sosial Agar Masuk Vokasi

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan agar informasi manfaat jaminan sosial bisa masuk ke dalam program vokasi dan pelatihan bagi para pekerja konstruksi, termasuk di dalamnya sosialisasi upaya preventif terjadinya kecelakaan kerja.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Syarif Burhanuddin mengatakan bahwa selain sosialisasi manfaat jaminan sosial, upaya preventif atau pencegahan terjadinya kecelakaan konstruksi juga harus dipahami oleh para pekerja konstruksi.

“Untuk sosialisasi dan edukasi, harus ada program-program khusus, termasuk vokasi di dalamnya. Para pekerja harus tahu cara bekerja sesuai standar yang ada, sehingga upaya preventif menjadi hal yang penting dipahami juga,” ujarnya di sela-sela penandatanganan perjanjian kerja sama Kementerian PUPR dengan BP Jamsostek terkait sinergi pe-

nyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan tenaga kerja konstruksi, di Jakarta, Rabu (11/12).

Dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup penyebarluasan standar, aturan, dan kriteria terkait jasa konstruksi kepada perusahaan jasa konstruksi dan tenaga kerja konstruksi itu sendiri.

Selain itu, BP Jamsostek dan Kementerian PUPR akan bersama-sama memastikan seluruh pekerja proyek konstruksi dibawah lingkup Kementerian PUPR sudah diikutsertakan dalam program perlindungan dari BP Jamsostek.

Syarief melanjutkan bahwa sosialisasi manfaat jaminan sosial dan upaya preventif tersebut bisa dimasukkan dalam program vokasi dan pelatihan yang diselenggarakan Kementerian PUPR untuk menggenjot sertifikasi para pekerja konstruksi. *(Aprianus Doni T.)*

Judul	<b>IBU KOTA NEGARA BARU: Proses Inventarisasi Lahan Tuntas</b>	Tanggal	Kamis, 12 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah merampungkan proses inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) pada lahan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur.		

► **IBU KOTA NEGARA BARU**

## Proses Inventarisasi Lahan Tuntas

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah merampungkan proses inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) pada lahan ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur.

Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN M. Adi Darmawan mengatakan pihaknya telah merampungkan proses IP4T pada lahan yang akan dibangun menjadi ibu kota negara (IKN) dengan total luas 180.000 hektare.

"Proses IP4T untuk lahan IKN seluas 180.000 hektare sudah selesai 100%, tetapi pada Oktober ada inisiasi untuk melakukan survei terhadap tambahan lahan di area pesisir timur," ujar Adi dalam acara Media Gathering

Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Rabu (11/12).

Adi menuturkan, berdasarkan pembahasan yang dilakukan di lintas kementerian, telah disepakati adanya tambahan luas lahan untuk IKN dari yang semula 180.000 hektare menjadi 256.000 hektare.

Hingga saat ini dia mengungkapkan pihaknya masih berupaya merampungkan proses IP4T untuk tambahan lahan tersebut.

Adi menjelaskan keputusan penambahan luas lahan dilakukan karena IKN yang baru nantinya diharapkan bisa terus berkembang hingga ratusan tahun ke depan. Adapun, proses pengembangannya tetap dilakukan secara bertahap.

Dia mengungkapkan proses IP4T dilakukan untuk mengidentifikasi keadaan dan kondisi lahan yang

akan dijadikan sebagai ibu kota negara.

Pihaknya menargetkan seluruh proses inventarisasi lahan bisa segera rampung, karena infrastruktur dasar untuk ibu kota negara diharapkan sudah mulai dibangun pada tahun depan.

"Kami melakukan pendataan secara mendetail dan sudah ada 76.000 bidang yang sudah kami data penguasaannya," jelasnya.

### ASET JAKARTA

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil mengatakan hingga saat ini pihaknya telah memiliki beberapa skenario terkait pemanfaatan aset-aset pemerintah yang ada di Jakarta setelah ibu kota dipindah.

"Skenarionya sebenarnya sudah ada, tetapi masih

terus dibahas, Kami masih kaji kira-kira kalau pusat pemerintahan pindah nanti gedungnya akan digunakan untuk apa," ujar Sofyan.

Meskipun pusat pemerintahan nanti tidak lagi ada di Jakarta, katanya, pemerintah akan tetap terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dan transportasi di kota tersebut.

Dia menambahkan bahwa pemerintah juga akan menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk mengoptimalkan aset-aset pemerintah yang ada di Jakarta dengan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Menurutnya, pendapatan yang dihasilkan dari skema kerja sama tersebut akan dimanfaatkan untuk menutupi kebutuhan pembangunan di ibu kota negara (IKN) yang baru. *(Fitri Sartina Dewi)*

Judul	<b>PEMBIAYAAN PERUMAHAN: BP Tapera Direalisasikan 2021</b>	Tanggal	Kamis, 12 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Eko D. Heripurwanto mengatakan bahwa Tapera baru akan direalisasikan untuk membiayai rumah subsidi pada 2021.		

► PEMBIAYAAN PERUMAHAN

# BP Tapera Direalisasikan 2021

Bisnis, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) belum bisa diandalkan untuk menyerap kebutuhan pembiayaan rumah subsidi pada 2020 karena baru akan dioperasikan pada 2021.

Mutiara Nabila  
redaksi@bisnis.com

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Eko D. Heripurwanto mengatakan bahwa Tapera baru akan direalisasikan untuk membiayai rumah subsidi pada 2021. Adapun saat ini BP tersebut masih dalam tahap persiapan pengurus.

"Jadi bukan mundur dari 2020, tetapi memang putusan dari Komisi Komite Tapera itu 2021. Saat ini masih membuat penguatan kelembagaan dan mempersiapkan kelengkapan regulasinya," ungkapnya ketika ditemui di Jakarta, Selasa (10/12).

Komisioner BP Tapera Adi Setianto sebelumnya mengatakan bahwa Tapera akan mulai beroperasi penuh mulai 1 Januari 2020. Namun, operasi yang dimaksudkan adalah memperkuat kepemimpinan untuk melakukan transisi penuh dari Bapertarum ke BP Tapera.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Adang Sutara juga menjelaskan bahwa komisioner yang telah dipilih harus bekerja terlebih dahulu sebelum mengoperasikan BP Tapera.

"Komisioner dan deputy harus terlebih dahulu melakukan persiapan dengan membentuk organisasi di bawahnya. Setelah dilantik, komisioner harus membentuk organisasinya dulu, memutuskan mau ada direktur dan divisi apa saja," jelasnya.

Kemudian, komisioner dan deputy juga harus segera menunjuk bank kustodian, manajer investasi, dan segera menetapkan dan menunjuk bank penyalur kredit pemilihan rumah (KPR), memindahkan dana dari yang

► **Komisioner yang telah dipilih harus bekerja terlebih dahulu sebelum mengoperasikan BP Tapera.**

► **Kalaupun BP tersebut sudah dioperasikan juga, belum tentu bisa menjawab keseluruhan kebutuhan pembiayaan rumah subsidi.**

sebelumnya disalurkan ke Tabungan Perumahan (Taperum) yang ada di Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) sebesar Rp10,20 triliun.

Pada akhir Maret 2019 lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono selaku Ketua Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah melantik Komisioner dan 4 Deputy Komisioner Badan Pengelola (BP) Tapera setelah resmi membubarkan Badan pertimbangan tabungan perumahan (Bapertarum) setahun sebelumnya.

Basuki melantik Adi Setianto selaku Komisioner BP Tapera, Eko Ariantoro sebagai Deputy Komisioner Bidang Pengerahan Dana, Gatut Subadio sebagai Deputy Komisioner Bidang Pemupukan Dana, Arief Baginda Siregar sebagai Deputy Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana, dan Nostra Tarigan sebagai Deputy Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 10 Tahun 2019.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdullah mengatakan kalaupun BP tersebut

sudah dioperasikan juga, belum tentu bisa menjawab keseluruhan kebutuhan pembiayaan rumah subsidi.

"Karena nanti *kan* konsentrasinya akan ke dana Bapertarum [Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan] sebelumnya, untuk PNS [Pegawai Negeri Sipil]. Yang jelas harapan kita pemerintah bisa bersinergi bagaimana mengatasi



kekurangan kuota untuk memenuhi kebutuhan rumah MBR," katanya.

## PENYESUAIAN FLPP

Terkait rencana penyesuaian skema pembiayaan rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Junaidi mengharapkan pemerintah punya kreasi agar dari anggaran yang ada bisa mendapat unit yang lebih banyak.

Beberapa usulan yang diajukan Apersi di antaranya adalah mengolah kembali dana yang ada dengan menghitung kembali pangsa dana dari pemerintah dan perbankan sehingga bisa menambah unit. Opsi lainnya adalah menyesuaikan kembali ting-

adalah mengupayakan bahwa penghasilan penerima FLPP bisa mulai di bawah Rp2 juta sampai di atas Rp6 juta. Berdasar aturan yang berlaku saat ini, gaji atau penghasilan pokok penerima FLPP tidak boleh melebihi Rp4 juta untuk rumah sejahtera tapak dan Rp7 juta untuk rumah sejahtera susun.

Selain usulan menghitung kembali anggaran yang ada atau menyesuaikan suku bunga, kata Junaidi, Apersi juga mengusulkan agar anggaran untuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) bisa dialokasikan ke FLPP. Hal itu karena menurutnya pembangunan PSU bisa dilakukan swadaya oleh pengembang.

"Belum lagi dana PSU ini kan sedikit tidak adil, karena anggarannya terbatas jadi hanya pengembang tertentu yang dapat. Kalau memang untuk meringankan harusnya semua dapat tanpa harus dipilih. Jadi kenapa PSU enggak ditaruh saja di FLPP?"

Kemudian, Junaidi menambahkan perbankan sekarang juga sudah mulai kreatif dengan memberikan beragam program suku bunga. Jika disatukan dengan subsidi menurutnya akan semakin bagus dan bisa menjadi upaya menambah unit.

"Misalnya perbankan efektif bunga rendahnya 3-5 tahun, kan bisa dikawinkan. Lalu untuk PTKP [penghasilan tidak kena pajak] di atas Rp4 juta bunganya dibedakan, misal yang biasa 5%, kalau PTKP di atas Rp4,5 juta bisa 6% lebih, ini *kan* bisa menambah unit," jelasnya. ■

Judul	<b>Tol Cisumdawu Terhambat Pembebasan Lahan</b>	Tanggal	Kamis, 12 Desember 2019
Media	Media Indonesia (Halaman, 5)		
Resume	Belum selesainya Tol Cisumdawu membuat jumlah wisatawan ke Bandung menurun, karena penerbangan terlanjur dialihkan ke Bandara Kertajati.		

# Tol Cisumdawu Terhambat Pembebasan Lahan

*Belum selesainya Tol Cisumdawu membuat jumlah wisatawan ke Bandung menurun, karena penerbangan terlanjur dialihkan ke Bandara Kertajati.*

**BAYU ANGGORO**  
anggoro@mediaindonesia.com

**P**EMBANGUNAN Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) yang akan menjadi akses utama menuju Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, hingga kini belum selesai. Padahal operasional bandara itu sangat tergantung kepada Tol Cisumdawu.

"Semua permasalahan (pariwisata) di Bandung dan Bandara Kertajati kuncinya di Jalan Tol Cisumdawu," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sesuai melantik 141 kepala desa hasil pemilihan serentak di Kabupaten Majalengka, kemarin.

Tol Cisumdawu dengan panjang 60,1 kilometer dan terdiri dari enam seksi, pembangunannya direncanakan sejak 2005, tetapi baru mulai dibangun pada 2012. Semula jalan bebas hambatan yang dibangun dengan biaya Rp8,7 triliun itu ditargetkan selesai dan bisa beroperasi pada 2015. Tetapi, hingga kini tidak kunjung selesai, bahkan pembebasan sebagian lahannya masih terkendala.

Pembebasan lahan seksi I saat ini baru 68,5%. Bahkan, seksi IV sampai VI belum banyak mencapai kemajuan, karena hingga September lalu

lahan untuk seksi IV dan V belum ada yang dibebaskan. Padahal, jika Tol Cisumdawu beroperasi, waktu tempuh Bandung-Bandara Kertajati hanya 45 menit, atau jauh lebih cepat dari saat ini yang memakan waktu dua jam.

Gubernur mengungkapkan, kunjungan wisatawan ke Bandung berkurang seiring dialihkannya aktivitas penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati. Meski demikian ia memastikan pembangunan Tol Cisumdawu terus dilakukan dan diharapkan segera selesai. "Kita kerja keras. Jalan Tol Cisumdawu sedang dikerjakan, harus beres secepatnya," ujar Emil.

Menurut Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Eddy Nasution, pengalihan penerbangan ke Bandara Kertajati dilakukan karena kapasitas Bandara Husein Sastranegara sudah tidak memungkinkan, terutama untuk diterbangi pesawat berukuran besar.

Wali Kota Bandung Oded M Danial meminta pemindahan penerbangan dikaji ulang agar tidak mengganggu sektor pariwisata di wilayahnya. Ia menyebutkan, pada 2018 jumlah wisatawan yang masuk ke Bandung mencapai 7,5 juta. Tetapi, sejak penerbangan dip-

indahkan ke Bandara Kertajati, jumlahnya menurun.

## Jalur Puncak II

Sementara itu, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berharap jalur Puncak II yang menghubungkan Cianjur dengan Bogor bisa segera terealisasi. Pasalnya, sering terjadinya kemacetan lalu lintas di jalur Puncak I berdampak negatif terhadap jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel di wilayah Cianjur.

Ketua PHRI Kabupaten Cianjur Nano Indrapraja mengatakan, kemacetan lalu lintas pada akhir pekan dan libur panjang tekadang membuat arus kendaraan dilakukan dengan cara buka-tutup. "Bagi kami, jawaban atas kemacetan itu adalah jalur Puncak II harus segera direalisasikan. Lihat saja sekarang, ruas jalan di Puncak masih segitu-gitu saja, tapi jumlah kendaraan terus meningkat," katanya.

Di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pembangunan infrastruktur yang dibiayai pemeringah pusat dikebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Banyumas Irawadi mengatakan tahun ini ada anggaran Rp66,6 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp55,48 miliar di antaranya digunakan untuk preservasi dan rekonstruksi ruas jalan dan penanganan jembatan.

"Rekonstruksi ruas jalan panjangnya mencapai 68,03 kilometer, sedangkan penanganan jembatan mencapai 735,9 meter," katanya. (LD/BB/DY/RF/N-1)

Judul	Capaian dan Target Kementerian PUPR: Infrastruktur Untuk Kesejahteraan Rakyat	Tanggal	Kamis, 12 Desember 2019
Media	Media Indonesia (Halaman, 13)		
Resume	Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kinerja serta kerja keras seluruh jajaran Kementerian PUPR.		



## Capaian dan Target Kementerian PUPR: Infrastruktur Untuk Kesejahteraan Rakyat

PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kinerja serta kerja keras seluruh jajaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ungkapan itu juga ditujukan kepada pihak terkait lainnya mulai pemda, BUMN dan mitra swasta, baik yang bergerak di bidang konstruksi maupun pembiayaan terhadap pencapaian target pembangunan 2015-2019.

Pesan itu disampaikan Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada peringatan Hari Bakti (Harbaki) Pekerjaan Umum (PU). Pada kesempatan tersebut, Luhut selaku Inspektur upacara Harbaki ke-74 PU di Lapangan Sapta Taruna, Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (3/12).

"Lima tahun terakhir ini kita telah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Namun, di tingkat ASEAN saat ini, daya saing infrastruktur kita masih di posisi ke-5, kalah dengan Thailand, Brunel, Malaysia, dan Singa-

pura. Untuk itu, saya mengajak kita semua bekerja lebih keras lagi untuk mengejar ketertinggalan dan menjadi yang terdepan," kata Presiden.

Pembangunan infrastruktur, katanya, tidak hanya untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan masyarakat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pembangunan harus memiliki dampak langsung yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya menaikkan kelas UMKK, pengem-

banagan pariwisata, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekspor.

Lima tahun ke depan, katanya, dilanjutkan pembangunan 60 bendungan, 1.000 embung, 500.000 ha jaringan irigasi baru, 2.500 km jalan tol, 60.000 km jalan baru, dan Program Satu Juta Rumah. "Kita juga akan meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum layak menjadi 90%, serta akses sanitasi dan persampahan menjadi 80%. Selain itu, kita akan mewujudkan pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur

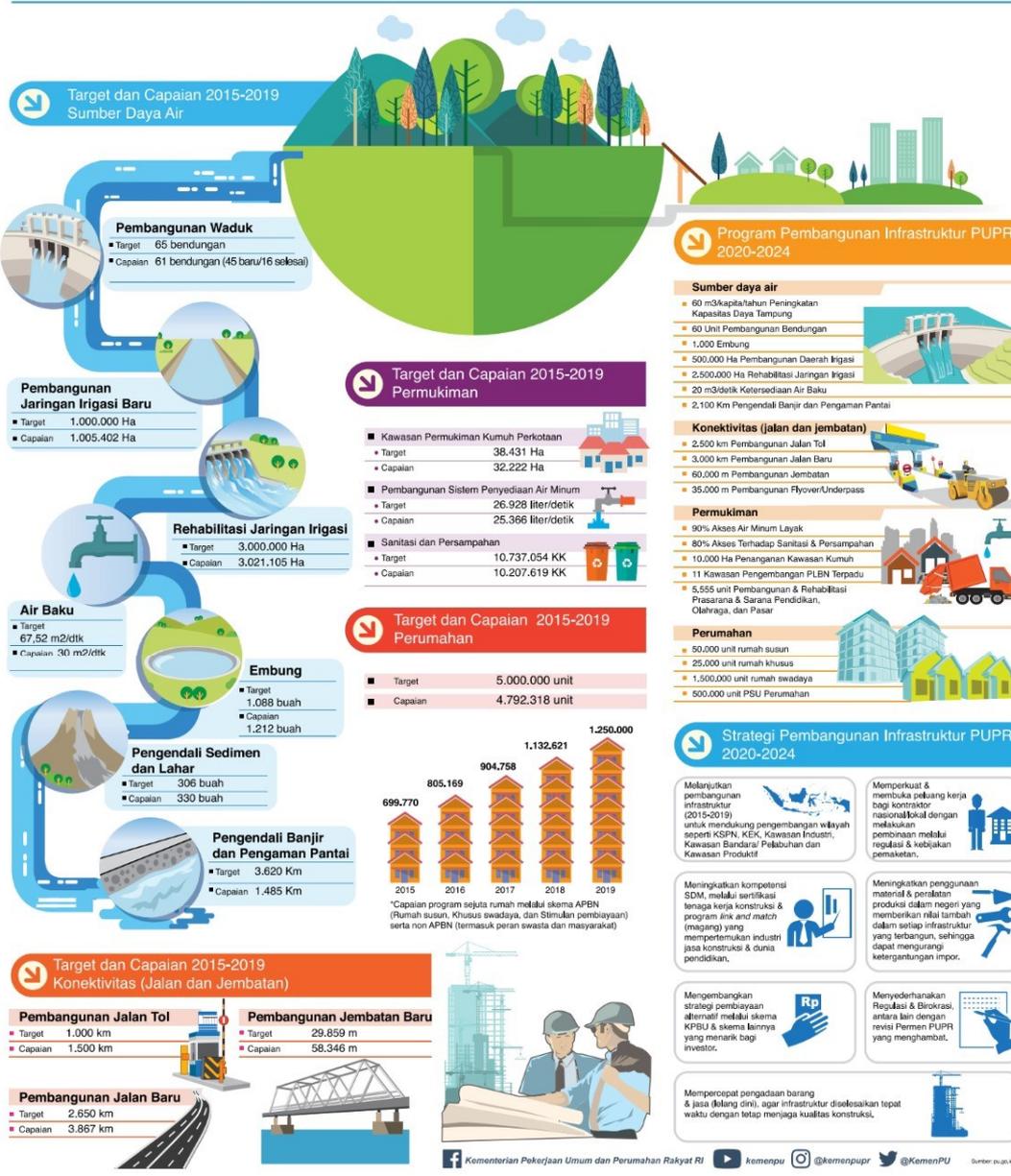
dengan konsep *smart metropolis*." Selain itu, dilakukan pembangunan infrastruktur lima destinasi wisata prioritas ditargetkan selesai akhir 2020. Yakni, kawasan Danau Toba di Sumatera Utara, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, dan Manado-Likupang di Sulawesi Utara.

Presiden juga menyoroti pentingnya peningkatan inovasi di bidang teknologi dan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur.

Terkait inovasi, Menteri PUPR, M

Basoeki Hadimoeljono, mengatakan akan terus mendorong generasi muda PUPR selalu berinovasi di bidang pembangunan infrastruktur. "Kami para pimpinan bertugas menyiapkan karakter generasi penerus kami agar Kementerian PUPR terus menjadi organisasi yang kredibel. Untuk itu, saya ingin sering mengadakan dialog dengan generasi muda dengan menampilkan sosok yang kreatif dan inovatif seperti *talk show* kemarin bersama Staf Khusus Presiden ter-muda Putri Tanjung." (\*)/SI-25

### Capaian dan Program Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR



Judul	<b>Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Siap Dioperasikan</b>	Tanggal	Kamis, 12 Desember 2019
Media	Koran Tempo (Halaman, Metro 1)		
Resume	Presiden Joko Widodo hari ini dijadwalkan meresmikan jalan tol layang Jakarta-Cikampek. Jalan bebas hambatan ini rencananya mulai difungsikan untuk menyambut libur Natal dan tahun baru.		

METRO

## Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Siap Dioperasikan

Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan jalan tol layang Jakarta-Cikampek hari ini.

EDISI, 12 DESEMBER 2019



Tol layang Jakarta-Cikampek II (Aerovision) di Bekasi, Jawa Barat, (foto paksi lab).

**BEKASI** – Presiden Joko Widodo hari ini dijadwalkan meresmikan jalan tol layang Jakarta-Cikampek. Jalan bebas hambatan ini rencananya mulai difungsikan untuk menyambut libur Natal dan tahun baru.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono berharap pengoperasian jalan tol elevated tersebut dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan tol Jakarta-Cikampek. "Kami berharap 30 persen (kendaraan) pindah ke atas (jalan tol layang)," katanya, Selasa lalu.

Basoeki mengatakan kendaraan yang dapat melintasi tol layang hanya golongan I non-bus. Karena itu, di pintu gerbang akan dibangun portal agar truk dan bus tidak bisa masuk. Namun portal itu bisa dibuka secara situasional. "Misalnya, jika ada rombongan presiden atau situasi sedang urgen, palang itu bisa dibuka," ujar dia.

Untuk faktor keamanan, kata Basoeki, telah dipasang tangga pada delapan putaran balik (u-turn). Selain itu, telah dipasang 113 kamera pengawas agar petugas lebih mudah memantau. Sehingga ketika terjadi kondisi darurat, petugas bisa segera mengambil tindakan.

Direktur Utama Jasamarga Jalan Layang Cikampek, Djoko Dwijono, menjelaskan bahwa 113 kamera pengawas terhubung dengan pusat informasi Jasamarga. "Jadi di sentral komunikasi, petugas bisa melihat langsung setiap kejadian," katanya. "Kami siap dengan kondisi emergency."

Jalan tol layang Jakarta-Cikampek II diklaim sebagai jalan tol layang terpanjang di Indonesia. Panjang jalan ini mencapai 36,4 kilometer dengan nilai investasi sebesar Rp 16,3 triliun. Kontraktornya, PT Waskita Karya Persero Tbk, membutuhkan waktu 34 bulan untuk merampungkan pembangunan jalan. Sedangkan untuk pengelolaan menjadi tanggung jawab PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek.

Rencana pengoperasian jalan tol layang itu mendapat sambutan dari masyarakat, terutama mereka yang biasa menggunakan jalan tol Jakarta-Cikampek. "Kami yang dari Bekasi secara otomatis tidak menggunakan jalan tol layang," kata Muhammad Abdullah, pengusaha di bidang jasa. Dia berharap dengan adanya jalan tol layang itu, kepadatan lalu lintas di jalan tol Jakarta-Cikampek bisa berkurang.

Abdullah mengatakan setiap hari beraktivitas di antara Bekasi-Cikarang. Ia biasa masuk dari gerbang tol Bekasi Timur dan keluar di Cibatu menuju ke pertokoan di Deltamas. Sementara pintu jalan tol layang Jakarta-Cikampek berada di Cikunir dan Karawang. "Mudah-mudahan kalau atas dibuka, kepadatan di bawah berkurang," katanya.

Untuk kendaraan yang menuju ke barat, kata Abdullah, kepadatan di jalan tol Jakarta-Cikampek kerap terjadi di Cibitung dan Cikarang Utama. Sedangkan untuk arah sebaliknya, kepadatan biasa terjadi di Cikarang Utama sampai dengan Tambun. "Kemacetannya bertambah parah kalau banyak truk yang melintas," kata dia.

EKO WAHYUDI | FRANCISCA CHRISTY ROSANA | ADI WARSONO | SUSENO